

Research article | DOI: 10.71155/besari.v3i1.94

Raden Batoro Katong dan Model Rekonsiliasi Hibrida dalam Merintis Kabupaten Ponorogo

Raden Batoro Katong and the Hybrid Reconciliation Model during the Establishment of Ponorogo Regency

Neng Eri Sofiana^{1*}

¹ Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo, Indonesia

* nengerisofiana@yahoo.com

Abstract

Pendirian Kadipaten Ponorogo (1486 M) merupakan hasil resolusi konflik antara Raden Batoro Katong (Kesultanan Demak) dan Ki Ageng Kutu (Wengker) yang dipicu oleh perbedaan keyakinan dan perebutan hegemoni politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis model rekonsiliasi hibrida yang diterapkan Raden Batoro Katong untuk mencapai perdamaian dan persatuan pasca-konflik. Metode yang digunakan adalah penelitian historis dengan tahapan heuristik, historiografi kritis, dan interpretasi, yang membedah data menggunakan kerangka teori resolusi konflik modern. Kajian ini menyimpulkan bahwa model rekonsiliasi Batoro Katong meliputi dua jalur utama: strategi politik yang diwujudkan melalui negosiasi, penggunaan taktik kuat, dan pembentukan kabinet rekonsiliasi; serta strategi ideologis yang diimplementasikan melalui Islamisasi kultural yang damai. Upaya ini menjadi solusi untuk mengakhiri perang, sekaligus fondasi struktural dan kultural identitas kolektif masyarakat Ponorogo.

The establishment of Ponorogo Regency (1486 AD) was the result of the conflict resolution between Raden Batoro Katong (Demak Sultanate) and Ki Ageng Kutu (Wengker) which was triggered by differences in beliefs and the struggle for political hegemony. This study aims to analyze the hybrid reconciliation model implemented by Raden Batoro Katong to achieve post-conflict peace and unity. The method used is historical research with heuristic stages, critical historiography, and interpretation, which dissects the data using the framework of modern conflict resolution theory. This study concludes that Batoro Katong's reconciliation model includes two main paths: a political strategy realized through negotiation, the use of strong tactics, and the formation of a reconciliation cabinet; and an ideological strategy implemented through peaceful cultural Islamization. This effort became a solution to end the war, as well as a structural and cultural foundation for the collective identity of the Ponorogo people.

Keywords

Batoro Katong; Kabupaten Ponorogo; rekonsiliasi konflik; strategi politik; sintesis ideologis; Wengker

Article history

Submitted: 17/10/2024; revised: 22/11/2025; accepted: 25/12/2025.



© 2025 by the author(s). This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Pendirian Kadipaten Ponorogo pada tahun 1486 M menandai titik balik penting dalam sejarah politik dan kebudayaan Jawa Timur, yang melibatkan transformasi mendasar dari wilayah kuno yang dikenal sebagai Kerajaan Wengker (Purwowijoyo, 1985). Wilayah ini, yang mencakup Kademangan Surukubeng, dipimpin oleh Ki Ageng Kutu Suryaalam (atau Ki Demang Kutu) sekitar tahun 1467-1468 M (Sugianto, 2016).

Kedaulatan Wengker memiliki kedalaman sejarah yang signifikan, melampaui era Majapahit. Sumber-sumber historis, seperti Prasasti Pucangan (1041 M) yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga dari Kerajaan Medang, telah mencatat Wengker sebagai entitas yang kuat dan pernah diserang, dengan tokoh perintis yang diyakini bernama Ketut Wijaya (Hidayati n.d.). Genealogi otonomi yang panjang ini menjelaskan mengapa perlawanan Ki Ageng Kutu terhadap Demak (sebagai penerus hegemoni Majapahit) harus diinterpretasikan sebagai resistensi sistemik untuk mempertahankan kedaulatan regional Wengker, dan bukan sekadar pemberontakan lokal biasa.

Tokoh sentral dalam konflik ini, Raden Batoro Katong, dikenal juga sebagai Joko Piturun atau Lembu Kanigoro, merupakan putra Brawijaya V (Raja Majapahit) dari istri kelima. Raden Katong diutus oleh Raden Fatah dari Kesultanan Demak untuk hadir ke kawasan yang sekarang menjadi Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (Purwowijoyo, 1985; Surur, 2024). Posisi ini memberikannya legitimasi ganda yang krusial: ia membawa darah Majapahit sekaligus mandat politik dari dinasti Islam yang dominan, Demak, menjadikannya penantang yang sah terhadap hegemoni Hindu-Buddha Ki Ageng Kutu.

Ketegangan di tanah Wengker bersifat dualistik, melibatkan benturan politik dan ideologis: *pertama*, konflik politis, di mana Ki Ageng Kutu diyakini telah lama berselisih paham dengan kebijakan Majapahit yang mulai mendukung penyebaran Islam. Dalam beberapa versi, perlawanannya dipicu oleh ketidakseimbangan kekuasaan raja yang dipengaruhi oleh permaisurinya. Akibatnya, perlawanan Kutu terhadap Demak adalah upaya eksplisit untuk mempertahankan otonomi politiknya. *Kedua*, konflik ideologis, di mana misi Islamisasi yang dibawa oleh Batoro Katong, termasuk Patih Seloaji dan Ki Ageng Mirah, berhadapan langsung dengan hegemoni Hindu-Buddha yang mengakar di Kademangan Surukubeng.

Meskipun narasi sejarah Ponorogo kaya, analisis sistematis mengenai mekanisme rekonsiliasi konflik yang digunakan Batoro Katong dalam transisi

kekuasaan dan ideologi—dari Kademangan Surukubeng menuju Kadipaten Ponorogo—masih sangat terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi secara sistematis bagaimana Katong, setelah menetralkan Ki Ageng Kutu, mengelola trauma dan potensi perpecahan struktural dengan menerapkan kerangka teori resolusi konflik modern.

Penelitian ini menggunakan kerangka rekonsiliasi hibrida, yang menggabungkan dimensi struktural dan kultural. Rekonsiliasi didefinisikan sebagai upaya perdamaian yang bertujuan memperbaiki relasi, mengakhiri pertikaian, dan memulihkan hak.

Pertama, Model Lederach (1997; Aminuddin et al., 2020) digunakan untuk menilai keberlanjutan perdamaian, yang memerlukan empat pilar: kebenaran, pengakuan, perdamaian, dan keadilan. Model ini sangat relevan untuk menganalisis pengakuan politik terhadap keluarga lawan pasca-konflik. *Kedua*, Model Forsyth dan Braithwaite (2020) digunakan untuk membedah evolusi taktis. Model ini membantu mengidentifikasi transisi strategi dari pendekatan negosiasi yang gagal (*commitment-negotiation*), beralih ke taktik yang kuat (*fighting* dan *spionase*), dan diakhiri dengan strategi kooperatif (*cooperating*) untuk mencapai persatuan dan inklusi politik.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan studi pustaka historis kritis. Metode yang diterapkan meliputi heuristik (pengumpulan data dari sumber primer seperti *Babad Ponorogo* dan sumber sekunder yang relevan), historiografi (penyajian kritis data, termasuk berbagai versi sejarah yang saling bertentangan), dan interpretasi (analisis data menggunakan kerangka teori rekonsiliasi konflik modern).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Ponorogo Sebelum Kehadiran Raden Katong

Sebelum kehadiran Raden Katong, telah muncul Kerajaan Wengker, sebagai pecahan dari Kerajaan Mataram Kuno, yang sekitar abad 6 M berada di wilayah Sumoroto Ponorogo, kemudian pindah ke Kanjuruhan, sekitar Malang kini, dan kembali muncul di kawasan Dolopo Madiun pada tahun 1018-1037 M, dan pada tahun 1078 kembali pindah ke selatan di wilayah Ponorogo, yakni di daerah Sambit (Krisdianto et al., 2021). Di kurun waktu tersebut, telah muncul pula kerajaan-

kerajaan di tempat lain di Nusantara, seperti Kerajaan Kutai di wilayah Kalimantan Timur pada abad ke-4 M, Kerajaan Tarumanegara di wilayah Bekasi pada abad ke-4 M, Kerajaan Sriwijaya di wilayah Palembang pada tahun 671-1377 M, Kerajaan Sunda pada tahun 662 (di versi lain 669)-1579 M, Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Medang di wilayah Jawa Tengah pada tahun 752-1006 M, dan kerajaan lainnya, sedangkan Kerajaan Majapahit sendiri berdiri sejak tahun 1293-1500 M (Bestari, 2023; Moelyadi, 1986; Prasetya, 2021).

Seperti yang disebutkan di atas, Kerajaan Wengker diyakini muncul dari pecahan Kerajaan Mataram Kuno yang semula berpusat di Jawa Tengah, kemudian karena bencana gunung meletus, pindah ke wilayah Jawa Timur dan tumbang oleh Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Wura-Wari (Prasetya, 2021), namun pada versi lain, Kerajaan Wengker bahkan diyakini sebagai kerajaan tua yang sudah ada di Jawa Timur. Hancurnya Kerajaan Mataram Kuno yang memiliki banyak peninggalan berupa candi-candi yang tersebar di berbagai daerah, seperti candi Borobudur, Prambanan, Sewu, Mendut, Pawon, berbagai prasasti dan relief (Annisa, 2024), melahirkan Kerajaan Kadiri (Panjalu) dan Kerajaan Janggala yang kemudian tumbang dikuasai oleh Kerajaan Singhasari (Prasetya, 2021).

Prasasti Pucangan atau Prasasti Calcutta yang dikeluarkan oleh Airlangga (Kerajaan Medang) pada tahun 963 Saka atau 1041 M ini menyebutkan nama Wengker sebagai salah satu musuhnya yang pernah diserang Airlangga pada tahun 951 Saka atau 1029 M dan tercatat banyak serangan lain hingga Wengker ditangkap pada 1037 M (Hidayati, n.d.). Pada versi ini, perintis pertama Kerajaan Wengker ialah Ketut Wijaya (Rofiq, 2020). Setelah periode ini, eksistensi Kerajaan Wengker diyakini masih tetap ada, yakni dengan memanfaatkan momentum perpecahan kerajaan Medang menjadi Kadiri dan Janggala untuk mengumpulkan kekuatan dengan melakukan berbagai hubungan erat, seperti pernikahan dengan pihak Kerajaan Majapahit, termasuk dengan munculnya Ki Ageng Kutu sebagai penguasa Kademangan Surukubeng sebagai wilayah kerajaan Majapahit pada kekuasaan Brawijaya V, dan ia diyakini sebagai keturunan dari Ketut Wijaya (Krisdianto et al., 2021).

Raja Brawijaya V atau Sri Prabu Kertawijaya atau Prabu Kerthobumi adalah raja Majapahit yang menikahi seorang muslimah dari Champa atau Tiongkok. Selain memiliki istri yang beragama Islam, anak-anaknya ada yang beragama Islam, seperti Raden Fatah atau Raden Joko Purbo yang menjadi adipati Demak, Aryo Damar atau Raden Joko Dhilah yang menjadi adipati Palembang, Arya Menak Koncang yang menjadi adipati Lumajang, Arya Lembu Kenongo atau Raden Joko

Pekik atau Aryo Jaran Panoleh yang menjadi adipati Madura, Raden Bondan Kejawen, Kyai Ageng Tarub II, Raden Dhandun Wangsaprana (Syekh Belabelu) dan Raden Katong yang kelak menjadi adipati Ponorogo (Purwowijoyo, 1985; Sunyoto, 2016). Sepeninggal Brawijaya V, Kerajaan Majapahit mengalami konflik perebutaan tahta hingga sempat mengalami kekosongan raja. Namun pada sebelumnya, Raden Fatah yang menjadi adipati Demak mengutus adiknya Batoro Katong untuk menuju daerah Wengker (Purwowijoyo, 1985; Surur, 2024).

2.2 Konflik dan Kondisi Ponorogo Era Raden Katong

Setelah mendapat mandat dari Raden Fatah (pada versi lain, kedatangan Batoro Katong atas perintah ayahnya), Batoro Katong berangkat bersama Patih Seloaji menemui Ki Ageng Mirah atau Ki Muslim atau Ki Sidiq Muslim atau Ki Ageng Honggojoyo atau Jaka Waleri putra Ki Ageng Gribig (menantu Sunan Giri)(Fuadi, n.d.; Sidi, 2019) yang telah berada di tanah Wengker untuk menyebarkan agama Islam dengan mendirikan masjid dan tempat belajar sederhana (Krisdianto et al., 2021). Selanjutnya, Batoro Katong, Patih Seloaji dan Ki Ageng Mirah bekerjasama untuk menyebarkan Islam di tanah Wengker dengan membuka lahan di Glagah Wangi Plampitan Jenangan (Soemarto, 2009), pada tahun 1486 kemudian mendirikan kadipaten Pramanaraga/Panaraga yang berasal dari *pana* yang berarti mengetahui segala sesuatu dan *raga* yang berarti badan yang selanjutnya berubah menjadi Ponorogo (Sugianto, 2015). Tidak hanya bertiga saja, Raden Fatah mengirimkan 40 santri kepala keluarga, selain itu terdapat pengikut Batoro Katong dari Bagelan (tempat asal ibunya) (Purwowijoyo, 1985). Pada versi lain, kedatangan Batoro Katong ke tanah Wengker saat itu dalam keadaan belum beragama Islam, kemudian memeluk agama Islam setelah negosiasi kerjasama dengan Ki Ageng Mirah. Pada versi ini, jumlah pengikut Batoro Katong pada awal kedatangannya di bumi Wengker berjumlah 1.000 orang (Pramono, 2006).

Kabar berdirinya Kadipaten Ponorogo mulai menggoyahkan Ki Ageng Kutu. Pada saat terjadinya musyawarah terkait langkah yang akan diambil oleh Ki Ageng Kutu, pasukan Kadipaten Ponorogo datang hendak memberitahukan pendirian kadipaten tersebut, namu terjadi pertumpahan darah yang menewaskan Honggolono (Purwowijoyo, 1985). Kemudian pada sebuah Jumat Wage, pasukan Kademangan yang berjumlah 100 orang dan telah berlatih ini menyerang Kadipaten, namun berakhir dengan pasukan Kademangan yang memilih untuk mundur. Selanjutnya, Raden Batoro Katong mendapatkan informasi terkait dua

pusaka yang menjadi kekuatan Ki Ageng Kutu, yakni keris Condongrawe atau Rawe Puspito dan tombak Kyai Jabarmas atau Jabardhas. Untuk hal ini, Raden Katong mengutus sepasang suami istri untuk menjadi abdi di Kademangan sekaligus mata-mata Kadipaten (Purwowijoyo, 1985). Pengambilan keris dilakukan langsung oleh Batoro Katong (Sidi, 2019), namun pada versi lain dilakukan oleh mata-mata tersebut (Soemarto, 2019).

Menurut *Babad Ponorogo*, ketika Raden Katong berhasil mendapatkan salah satu pusaka Ki Ageng Kutu, kehadirannya telah diketahui dan terjadilah perang, namun dalam perang itu tidak nampak di mana musuhnya, sebab sedang dalam penyamaran. Hingga terjadi pertempuran antara Ki Ageng Kutu melawan Raden Katong, Patih Seloaji, dan Ki Ageng Mirah. Pada akhirnya, kepala Ki Ageng Kutu berhasil ditebas oleh Patih Seloaji di Gunung Dloka (Purwowijoyo, 1985).

Sepulang dari Gunung Dloka, Raden Katong memberi mandat kepada Patih Seloaji untuk mengatur dan menjaga Kademangan, dan Niken Gandhini diperistri oleh Raden Katong (Purwowijoyo, 1985). Tidak hanya itu, anak Ki Ageng Kutu, yakni Suromenggolo menjadi pengawal pribadi Raden Katong, sedangkan anaknya yang lain, Surohandoko menggantikan ayahnya menjadi Demang di Surukubeng (Purwowijoyo, 1985). Tidak hanya itu, para warok yang ikut andil dalam kepemimpinan Ki Ageng Kutu juga mendapat posisi atau jabatan dari Raden Katong, kecuali dua warok yang menentang Raden Katong (Moelyadi, 1986).

Berbeda jauh dengan versi ini, dalam buku *Kerajaan Wengker* yang diterbitkan oleh Lesbumi Ponorogo menyatakan bahwa terdapat versi lain terkait dengan berdirinya Ponorogo, yakni adanya pernikahan Raden Batoro Katong dan Niken Gandhini sebagai anak dari Ki Ageng Kutu pada 17 April 1486, kemudian pada tahun 1489 M Ki Ageng Kutu menyerahkan Kademangan kepada Raden Katong dan anaknya (Jenggo, n.d.).

2.3 Anatomi Konflik dan Model Rekonsiliasi Raden Katong

A. Eskalasi Konflik dan Transisi Taktik

Konflik di Wengker dimulai pada tahun 1486 M ketika Raden Batoro Katong mendirikan Kadipaten Ponorogo di Glagah Wangi, yang secara langsung menantang Ki Ageng Kutu di Kademangan Surukubeng. Awalnya, Raden Katong menggunakan jalur negosiasi (sebagaimana dalam strategi *commitment-negotiation* Forsyth & Braithwaite). Namun, negosiasi ini gagal

mencapai kesepakatan karena perbedaan ideologi dan komitmen politik yang mendasar, yang kemudian berujung pada pertumpahan darah.

Kegagalan diplomasi ini memaksa Raden Katong beralih ke taktik kuat (*strong tactics*), yang berbasis intelijen. Ia menyadari bahwa kekuatan magis dan simbolik Ki Ageng Kutu terletak pada pusaka utamanya. Raden Katong mengutus mata-mata ke Kademangan. Titik balik strategi ini adalah persuasi terhadap Niken Gandhini, putri Ki Ageng Kutu, yang memungkinkan netralisasi pusaka (Keris Condongrawe dan Tombak Kyai Jabarmas).

Penggunaan persuasi terhadap Niken Gandhini, bahkan ketika Raden Katong menerapkan taktik kuat, menunjukkan strategi *Moral Imagination* (imajinasi moral) yang fleksibel. Ini adalah investasi strategis di mana pemimpin tidak hanya berfokus pada kemenangan militer, tetapi juga mengamankan ahli waris dinasti oposisi untuk legitimasi pasca-konflik. Dengan mengamankan loyalitas Niken Gandhini sebelum pertempuran final, Katong memastikan bahwa ketika Ki Ageng Kutu dilumpuhkan, titik keretakan politik internal (ahli waris) sudah diamankan dan diyakinkan, memungkinkan integrasi struktural segera alih-alih menghadapi perlawanan sporadis berkepanjangan.

B. Rekonsiliasi Naratif untuk Mengelola Trauma Politik

Konflik fisik memuncak di Gunung Dloka, yang berakhir dengan tewasnya Ki Ageng Kutu oleh Patih Seloaji. Namun, historiografi lokal menyediakan narasi yang kontradiktif: Kutu *moksa* di Gunung Bacin, atau ia menyerahkan kekuasaan setelah pernikahan Raden Katong dengan Niken Gandhini. Perbedaan narasi mengenai nasib Ki Ageng Kutu ini tidak dapat diabaikan, melainkan harus dianalisis sebagai upaya rekonsiliasi naratif yang memiliki fungsi politik jangka panjang. Narasi *moksa* (*spiritual disappearance*), misalnya, berfungsi sebagai perangkat kepemimpinan yang strategis. Ia memberikan akhir yang terhormat bagi Ki Ageng Kutu, seorang pemimpin yang karismatik dan dihormati. Selain itu, strategi ini secara efektif menjalankan fungsi mitigasi spiritual dan politik:

Pertama, dari fungsi pengakuan spiritual, dengan menyatakan Kutu *moksa*, Raden Katong memberikan pengakuan kehormatan (*pilar Lederach*) kepada pihak yang kalah. Hal ini krusial untuk menetralkan potensi dendam

berkepanjangan dari para pengikut setianya (Warok), serta mengubah trauma kekalahan menjadi semacam harapan spiritual bagi masyarakat Wengker untuk menjamin stabilitas.

Kedua, dari fungsi legitimasi politik, pernikahan dengan Niken Gandhini segera melegitimasi kekuasaan Raden Katong melalui ikatan kekerabatan dengan elit lokal, memfasilitasi pengambilalihan dinasti secara damai.

Narasi *moksa* berfungsi sebagai bentuk *Kebenaran* yang disesuaikan, di mana kebenaran faktual tentang pembunuhan ditukarkan dengan *Pengakuan* atas kehormatan pihak yang kalah. Demikian juga narasi pernikahan, sebagai *Kebenaran* yang secara faktual terjadi paska pertempuran, ditukar dengan *Pengakuan* telah dilaksanakan sebelum terjadinya konflik, dan berperan vital dalam menyelesaikan konflik. Strategi ini merupakan prasyarat kepemimpinan untuk memastikan konsolidasi politik pasca-perang.

C. Rekonsiliasi Struktural Melalui Kabinet Rekonsiliasi

Rekonsiliasi politik yang mendalam terjadi setelah eliminasi Ki Ageng Kutu krusial untuk mencegah disintegrasi. Raden Katong menerapkan strategi kerjasama (*cooperating*) dari Forsyth dan Braithwaite dengan membentuk apa yang dapat dianalogikan sebagai "kabinet rekonsiliasi". Strategi ini berfokus pada integrasi struktural elit lama Kademangan ke dalam Kadipaten baru, memenuhi pilar pengakuan, perdamaian, dan keadilan dari Lederach.

Di antaranya, Raden Katong memastikan keluarga inti dan pejabat berpengaruh Ki Ageng Kutu mendapatkan posisi dan kejelasan atas nasib mereka: *pertama*, Niken Gandhini dinikahi oleh Raden Katong untuk mengikat dua garis kekuasaan. *Kedua*, Suromenggolo, putra Ki Ageng Kutu, diangkat sebagai pengawal pribadi Raden Katong, menempatkan loyalis lama di lingkaran kekuasaan inti. Pemberian jabatan kepada anggota keluarga lawan adalah langkah politik yang sangat cermat. Ini bukan sekadar amnesti, tetapi pengikatan struktural yang mengubah mantan ancaman menjadi penjamin stabilitas internal. *Ketiga*, Surohandoko, putra Ki Ageng Kutu, diangkat menjadi Demang di Surukubeng. Tindakan ini memberikan keadilan dalam pemulihan hak politik teritorial keluarga Kutu. Dan *keempat*, mayoritas Warok (pengikut setia Kutu) juga diberikan jabatan, untuk menunjukkan upaya sistematis dalam membangun loyalitas baru dan menginstitutionalkan hasil konflik.

Model rekonsiliasi politik sebagaimana dalam Tabel 1 ini adalah bentuk integrasi struktural yang efektif karena bersifat inklusif, memastikan bahwa kekalahan Ki Ageng Kutu tidak menghasilkan anarki atau perang saudara berkepanjangan, tetapi fondasi bagi konsolidasi politik era Ponorogo baru.

Tabel 1. Aplikasi Hibrida Rekonsiliasi Konflik oleh Raden Batoro Katong

Tahapan	Strategi (Forsyth & Braithwaite)	Kunci &	Tujuan Politik/Ideologis	Pilar Lederach yang Terpenuhi
Awal Konflik (1486 M)	Negosiasi (gagal) dan <i>Fighting</i>		Menegaskan kedaulatan Kadipaten Ponorogo	Kebenaran (Muncul pasca konflik)
Netralisasi Simbolik	<i>Strong Tactics</i> (Spionase & Persuasi Niken Gandhini)		Mengikis basis kekuatan simbolik lawan dan membuka pintu rekonsiliasi personal	Taktik pendukung Pengakuan
Pasca-Konflik	<i>Cooperating</i> (Kabinet Rekonsiliasi)		Integrasi struktural elit lama (<i>Warok</i> , Keluarga Kutu) ke dalam struktur Kadipaten	Pengakuan (Status), Perdamaian, Keadilan (Pemulihan Hak Politik)

D. Sintesis Ideologis dan Pembentukan Identitas Kultural

Raden Katong juga menerapkan dualitas strategi Islamisasi, yakni Islamisasi Formal (Jalur *Top-Down*) yang dilaksanakan melalui yurisdiksi Adipati, yang awalnya menghasilkan karakter Islam yang "keras" (*hard*) dan memicu penolakan awal dari masyarakat lokal, dan Islamisasi Kultural (Jalur *Bottom-Up*) yang dilakukan oleh para santri dan pendakwah, menggunakan pendekatan budaya yang menghasilkan karakter "Islam yang damai" (*peaceful Islam*). Pendekatan kultural ini terbukti efektif dan langgeng dalam menyebarkan agama secara luas di Ponorogo.

Kegagalan pendekatan formal di awal konflik tampaknya mendorong Raden Katong untuk mengadopsi jalur kultural yang lebih luwes. Kemampuan adaptif dalam strategi ideologis ini memungkinkan transisi yang lebih mulus

dan penerimaan agama yang lebih merata. Strategi inti dalam rekonsiliasi ideologis adalah kooptasi kesenian Reyog Ponorogo. Reyog, yang diyakini sebagai aksi satir Ki Ageng Kutu terhadap Majapahit, awalnya merupakan simbol identitas perlawanan Wengker. Alih-alih melarangnya, Raden Katong mempertahankan Reyog dan mengadaptasinya sebagai medium dakwah. Akulturasi simbolik ini diwujudkan melalui penambahan tasbih pada figur dadak merak, topeng yang digunakan dalam kesenian tersebut.

Tindakan ini merupakan penguasaan hegemoni kultural yang strategis. Dengan mengintegrasikan simbol perlawanan dan menyematkan simbol Islam, Raden Katong berhasil mengubah Reyog dari simbol penolakan terhadap kekuasaan baru menjadi kendaraan budaya yang memperkuat identitas sintesis Muslim Ponorogo (Dwijayanto & Rohmatulloh, 2018). Selain itu, Raden Katong juga memberikan perlindungan terhadap *pandhita* atau pemimpin agama Hindu-Buddha setelah transisi kekuasaan. Pelindungan ini membuktikan bahwa rekonsiliasi Katong mencakup dimensi ideologis-komunal, menjamin Keadilan dan Perdamaian komunal.

Model akomodatif Raden Batoro Katong juga membentuk karakter masyarakat Ponorogo yang inklusif dan toleran, di mana tradisi lokal dan nilai agama dapat beroperasi dalam sintesis yang kuat. Strategi kepemimpinan yang menerapkan 'Pengakuan' terhadap pihak yang kalah, bahkan musuh politik, sebagai syarat mutlak untuk perdamaian jangka panjang, menawarkan *uswatun hasanah* atau teladan yang baik dalam tahapan akhir rekonsiliasi konflik.

3. SIMPULAN

Raden Batoro Katong berhasil membangun Kabupaten Ponorogo di atas fondasi konflik historis melalui implementasi model rekonsiliasi hibrida yang terstruktur dan adaptif. Keberhasilan ini didasarkan pada kombinasi otoritas vertikal (penggunaan taktik kuat dan eliminasi oposisi cepat) yang segera diikuti oleh strategi integratif horizontal. Secara ringkas, model rekonsiliasi ini mencakup, *pertama*, rekonsiliasi politik, yakni transisi taktis dari *fighting* menuju *cooperating* (Forsyth & Braithwaite), diwujudkan melalui Kabinet Rekonsiliasi, yang berhasil memenuhi pilar Pengakuan dan Keadilan (Lederach) dengan mengintegrasikan elit dan keluarga Ki Ageng Kutu ke dalam struktur kekuasaan baru. *Kedua*, rekonsiliasi ideologis, melalui penerapan jalur Islamisasi kultural yang damai dan adaptif, serta penerimaan spiritual luas melalui adaptasi simbol lokal seperti Reyog Ponorogo.

Dengan menggabungkan inklusi struktural dan toleransi budaya, Raden Katong mampu memutus lingkaran kekerasan pasca-perang, menghasilkan konsolidasi politik yang menjadi fondasi stabilitas tata pemerintahan Ponorogo yang lestari hingga kini. Kajian ini menegaskan bahwa model kepemimpinan yang berhasil dalam transisi ideologi di masyarakat majemuk adalah model yang memilih strategi adaptasi atau kooptasi simbol perlawanan daripada pemusnahan simbol tersebut. Warisan ini adalah akar nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian yang relevan bagi kajian sosial dan budaya kontemporer

REFERENSI

- Annisa, A. (2024). 'Mataram Kuno: Sejarah Raja dan Peninggalannya'. *Fakultas Hukum UMSU* Retrieved from <https://fahum.umsu.ac.id/mataram-kuno-sejarah-raja-dan-peninggalannya>.
- Dwijayanto, A., & Rohmatulloh, D. M. (2018). Ponorogo, the Little Java: Potret Kebudayaan Dan Keberagamaan Masyarakat Muslim Ponorogo Abad XX. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 13(01), 1-31. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v13i01.2>.
- Forsyth, M., & Braithwaite, V. (2020). From reintegrative shaming to restorative institutional hybridity. *The International Journal of Restorative Justice*, 3(1), 10-22. <https://doi.org/10.5553/TIJRJ/258908912020003001002>
- Fuadi, M. A. (2023). 'Historiografi Alur Islamisasi Ponorogo: dari Ki Ageng Mirah hingga Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari'. *Besari: Journal of Social and Cultural Studies*, 1(1), 31-48. <https://doi.org/10.71155/besari.v1i1.10>
- Hidayati, N. (2014) 'Kontestasi Politik Budaya antara Wengker dan Kadiri: Fragmentasi Genealogi Kesenian Jaranan'. In: *Filsafat Islam: Historisitas dan Aktualisasi (Peran dan Kontribusi Filsafat Islam Bagi Bangsa)*. Prosiding, Vol. 1 (Cet. 1). FA Press, Yogyakarta, pp. 162-193. ISBN 978-602-70288-5-2
- Jenggo, K. n.d. *Kerajaan Wengker*. Ponorogo: Wisma Sahabat Ponorogo.
- Krisdianto, et al., (2021). *Jejak Sejarah NU Ponorogo*. Ponorogo: LTN NU Ponorogo.
- Lederach, J. P. (1997). *Sustainable reconciliation in divided societies*. Washington, DC: USIP.
- Moelyadi, M. (1986). *Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker Dan Reyog Ponorogo*. Ponorogo: Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga.
- Pramono, M. F. (2006). *Raden Bathoro Katong Bapak'e Wong Ponorogo*. Ponorogo: LP2BM Ponorogo.
- Purwowijoyo, P. (1985). *Babad Ponorogo Jilid I*. Ponorogo: Pemda Ponorogo.

- Prasetya, P. (2021). *Jejak Peradaban Kerajaan Hindu Jawa 1042-1527 M*. Yogyakarta: Araska.
- Rofiq, A. C. (2020). *Historiografi Lokal : Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo*. Bintang Pustaka Madani.
- Sidi, N. A. (2019). *Sejarah Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: MGMP Sejarah SMA-MA-SMK Kabupaten Ponorogo.
- Soemarto, S. (2009). *Menelusuri Perjalanan Reyog Ponorogo*. Ponorogo: CV Kotareog media.
- Soemarto, S. (2019). *Melihat Ponorogo Lebih Dekat*. Yogyakarta: Terkata.
- Sugianto, A. (2015). *Eksotika Pariwisata Ponorogo*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sugianto, A. (2016). 'Kebudayaan Masyarakat Jawa Etnik Panaragan'. *Aristo* 4(1):45. doi: 10.24269/aristo.iv/1.2016.4.
- Sunyoto, A. (2016). *Atlas Wali Songo: buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah*. Edisi revisi. Depok, Bandung, Depok: Pustaka IIMaN
- Surur, M. (2024). 'Benturan islam di pedalaman Jawa dalam memori babad alit dan babade nagara Patjitan'. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 14(1):66. doi: 10.25273/ajsp.v14i1.17306.